



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 14 Agustus 2021

Halaman: 1



Siapkan Skema One Gate System

Sambungan dari hal 1

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja ini menjelaskan, selain sebagai upaya penekanan protokol kesehatan (prokes) perjalanan antarkota, juga untuk melindungi warga kota serta pelaku wisata lainnya. Disamping, juga upaya dilakukan sembari penataan arus lalu lintas di Kota Jogja.

"Semua bus nantinya harus di-skrining kelengkapan suratnya. Jika lengkap, baru boleh masuk. Kalau yang tidak lengkap, tidak boleh masuk," ujarnya.

Skrining terhadap rombongan wisatawan menggunakan bus pariwisata dilakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan Kota Jogja. Bus-bus yang lolos skrining nantinya akan diberikan tanda oleh Dishub dan dipersilakan melanjutkan perjalanan.

Sebaliknya, bus yang tidak memperoleh tanda dari Dishub maka tidak bisa masuk ke tempat parkir wisata di Kota Jogja. "Sehingga nanti bus begitu masuk kota, sudah tahu di mana tempat parkirnya. Bus tidak lagi mencari-cari tempat parkir," jelasnya.

Sementara untuk kawasan Malioboro, Pemkot masih memegang teguh wacana pembatasan waktu kunjungan maksimal dua jam dan parkir tiga jam. Menurutnya, keramaian diklaim bakal kembali terjadi di Malioboro saat aturan dilonggarkan, sehingga harus bisa dikendalikan.

Dengan upaya ini diharapkan tidak akan terjadi kerumunan besar di Malioboro, terutama di masa pasca PPKM nanti.

"Ini kan untuk mengatur arus masuk Malioboro agar kondusif. Kita harus menjaga dan melindungi semua warga, termasuk animo masuk Malioboro bisa dikendalikan jumlah orangnya," terangnya.

Menurutnya, ide-ide terkait aturan baru itu sudah didiskusikan dan disepakati semua pihak, meski masih bersifat informal. Sebab, langkah ini merupakan salah satu jalan untuk membangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi, tanpa mengorbankan aspek kesehatan. "Kita harus belajar dari kasus yang selama ini dialami, bahwa setiap aktivitas besar atau liburan sering diikuti naiknya kasus," tandasnya.

HP menyebut, agar kondisi itu tidak berulang kembali, maka pihaknya berkomitmen membuat perubahan yang diupayakan secara bersama-sama dan mendapat dukungan semua pihak. Lonjakan kasus Covid-19 pada akhir 2020 dan sepanjang Juli 2021 harus diantisipasi dengan adaptasi pola penanganan dan protokol yang baru.

"Kita mencoba membuat perubahan, bahwa aktivitas dan wisata di masa pandemi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita semua tidak ingin kasus meningkat terus, kemudian diterapkan PPKM lagi," tambahnya. (wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005